

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian diberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada tahun 2004 telah diberlakukan UU yang baru yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat di daerah itu.

Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ,ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.

Dan yang terakhir adalah diberlakukannya Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari tujuh tahun diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah bukan otonomi ” daerah ” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Proses pembangunan ekonomi daerah merupakan dasar dari keberhasilan pembangunan nasional yang selama ini telah dilaksanakan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Dalam proses pembangunan ini akan berhasil baik, jika di dukung sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam hal ini sumber daya yang merupakan sarana pokok dalam pembangunan akan berperan dalam lancarnya proses pembangunan tersebut. Pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien juga akan diarahkan untuk pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Sesuai konsekuensi dari asas desentralisasi, dibentuklah unit-unit pemerintahan setempat yang disebut dengan daerah otonom, yaitu daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi pada daerah bertujuan untuk memperlancar pembangunan keseluruhan wilayah di Indonesia.

Dengan menurunnya penerimaan negara dari minyak dan pajak pada tahun 1983/84 dan berdampak pada menurunnya anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1984/85, maka timbullah kesadaran akan menurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi kepada pemerintah daerah maupun dalam membiayai proyek-proyek pemerintah di daerah. Untuk itu maka pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar melemahnya subsidi dari pemerintah pusat tidak mengganggu perkembangan

ekonomi maupun jalannya pemerintah di daerah. Dengan kata lain penurunan penerimaan negara tersebut telah mendorong meningkatnya palaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan (Suparmoko, 2003)

Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalian potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002)

Keberhasilan otonomi daerah tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang bersangkutan, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah, dengan keberhasilan pembangunan daerah akan menunjang pembangunan nasional (Halim,2002).

Seperti yang terjadi di Kota Kediri yang identik dikenal sebagai Kota Rokok Kretek. Karena di kota itulah, berdiri pabrik rokok kretek PT.Gudang

Garam di atas areal seluas 250 hektar dan memiliki sekitar 40.000 karyawan dan buruh, di Kediri juga terdapat masalah-masalah mengenai PAD dalam pelaksanaan Otonomi Daerahnya.

Tabel 1.1
Data Realisasi PAD Kota Kediri Tahun 2000-2008

Tahun	Realisasi PAD
2000	17.725.000.000
2001	18.149.000.000
2002	20.962.000.000
2003	33.719. 000.000
2004	36.292. 000.000
2005	39.184. 000.000
2006	55.150. 000.000
2007	75.564. 000.000
2008	72.953. 000.000
2009	78.900.000.000
2010	83.420.679.281

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

Kota Kediri terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Kediri dengan luas wilayah 63,40 km² memiliki batas-batas daerah. Di mana sebelah utara berbatasan langsung dengan Jombang dan Nganjuk, sebelah selatan Kediri berbatasan langsung dengan Blitar dan Tulungagung. Sebelah barat Kediri berbatasan dengan Gunung Wilis. Batas terakhir geografis Kediri sebelah timur adalah Malang dan Jombang

Tabel 1.2
Luas Wilayah Kota Kediri

No	Kecamatan	Luas (Km2)
1.	Mojoarjo	24,60
2.	Kota	14,90
3.	Pesantren	23,90
Total		63,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2003

Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan terbesar yaitu Kecamatan Mojoroto, Kota, dan Pesantren seluas 63,40 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 240.979 jiwa, dan 46 kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Mojoroto (24,6 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Kota (14,9 km²).

Kediri mampu mencapai prestasi yang luar biasa, salah satunya di bidang otonomi daerah. Kediri menduduki peringkat ke -3 dari 200 Kota/ Kabupaten yang ada di Jawa Timur pada tahun 2005. tujuan utama dari penerapan kebijakan otonomi daerah adalah tujuan demokrasi dan kesejahteraan. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri telah mencapai prestasi yang cukup menggembirakan.

(<http://www.jatimprov.go.id>).

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan.

Kediri sebagai salah satu kota yang ada di Jawa Timur tidak terlepas dari permasalahan PAD dalam pelaksanaan otonomi di daerahnya. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, maka Penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD Kota Kediri dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul :

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Kediri Tahun 1985-2010

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam tulisan ini adalah seberapa besar pengaruh Produk domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri, Jumlah Penduduk di Kediri, Tingkat Inflasi, dan Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kota Kediri Tahun 1985-2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri, Jumlah Penduduk di Kediri, Tingkat Inflasi, dan Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kota Kediri Tahun 1985-2010.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian di atas diantaranya adalah:

1. Diharapkan agar pemerintah Kota Kediri bisa menentukan langkah-langkah lebih lanjut mengenai peningkatan pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah yang diterimanya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah Tahun 1985-2010.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan gambaran informasi sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya.
3. Sebagai aplikasi dari teori-teori ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi pembangunan pada khususnya serta diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian dan kepustakaan yang telah ada.
4. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengenal ekonomi pembangunan.
5. Sebagai tambahan referensi bagi buku-buku yang sudah ada, khususnya bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta
6. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk data *timeseries* tahunan yaitu berupa arsip PAD dari Badan Pusat Statistik Kota Kediri selama 25 tahun, yaitu PAD tahun 1985 – 2010.

Data dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder, yaitu data atau informasi yang dilakukan oleh pihak lain berupa penulisan yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian.

2. Metode pengumpulan data

Library research yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku literatur, brosur, dokumen, catatan kuliah, surat kabar dan referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta data PAD dari Badan Pusat Statistik Kota Kediri selama periode 25 Tahun, yaitu tahun 1985-2010.

3. Alat dan model analisis

Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kota Kediri, maka alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda *Error Corection Model* (ECM). Hal ini dikarenakan kemampuan ECM dalam mencakup lebih banyak variabel untuk menganalisis fenomena jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian mengkaji konsisten atau tidaknya suatu model empiris dengan teori ekonometrika.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri (sebagai variabel dependen), dan Pendapatan Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri, Jumlah Penduduk di Kediri, Tingkat Inflasi, dan Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan (sebagai variabel independen). Spesifikasi model jangka panjang dapat diformulasikan sebagai berikut (Gujarati, 1995).

$$D \ln Y_t = \beta_0 + \beta_1 D \ln X_{1t} + \beta_2 D \ln X_{2t} + \beta_3 D \ln X_{3t} + \beta_4 D \ln X_{4t} +$$

$$\beta_5 D \text{Ln}X_{5t} + \beta_6 B \text{Ln}X_{2t} + \beta_7 B \text{Ln}X_{3t} + \beta_8 B \text{Ln}X_{4t} + \beta_9 \text{ECT} + U_t$$

Dimana :

$$\text{ECT} : B \text{Ln}X_{1t} + B \text{Ln}X_{2t} + B \text{Ln}X_{3t} + B \text{Ln}X_{4t} - B \text{Ln} Y_t$$

Keterangan:

- Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri
- X₁ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri
atas dasar harga konstan.
- X₂ : Jumlah Penduduk di Kediri
- X₃ : Tingkat Inflasi
- X₄ : Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan
- D LnX₁ : Perubahan PDRB
- D LnX₂ : Perubahan Jumlah Penduduk
- D LnX₃ : Perubahan Inflasi
- D LnX₄ : Perubahan Pengeluaran pemerintah untuk
pembangunan
- β₀ : Konstanta
- β₁,β₉ : Koefisien Regresi
- B : *Backward log operation*
- U_t : Variabel Pengganggu

4. Definisi operasional Fariabel

a. Uji Stasioneritas

- 1) Uji akar-akar unit (*unit root test*)

Uji akar-akar unit ini dimaksudkan untuk menentukan stasioner atau tidaknya sebuah variabel. Apabila data yang diamati dalam uji akar-akar unit (*unit root test*) ternyata belum stasioner, maka harus dilanjutkan dengan uji derajat integrasi (*Integration Test*) sampai memperoleh data yang stasioner. Pengujian akar-akar unit dengan derajat integrasi sama-sama akan dilakukan dengan menggunakan uji DF (*Dickey-Fuller*) dan uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*).

2) Uji kointegrasi (*Cointegration test*)

Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan terikat, dan uji ini merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit (*unit root test*) dan uji integrasi (*Integration test*).

3) Uji derajat integrasi (*1st Difference*)

Uji derajat integrasi merupakan lanjutan dari uji kointegrasi. Uji derajat integrasi (*1st Difference*) perlu dilakukan untuk penstasioneran data agar diperoleh hasil regresi yang tidak langsung.

b. Pengujian Asumsi Klasik.

1) Uji Heteroskedastisitas

Kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas.

2) Uji Autokorelasi

Autokorelasi mengidentifikasi adanya pengaruh nilai variabel masa lalu terhadap nilai variabel masa kini atau mendatang.

3) Uji Normalitas (Ut)

Asumsi normalitas gangguan Ut penting sekali, mengingat uji validitas pengaruh variabel independen baik secara serempak (Uji F) maupun sendiri-sendiri (Uji t) dan estimasi nilai variabel independen. Uji normalitas yang digunakan adalah uji *Jarque-Berra*.

4) Uji Spesifikasi Model (*Ramsey-Reset*)

Uji spesifikasi model juga disebut uji linearitas, hal ini dikarenakan uji *Ramsey-Reset* digunakan untuk mengetahui apakah model yang diuji linier atau tidak.

c. Uji Statistik

Uji ini menilai *Good Ness of Fit* yang terdiri dari :

1) Uji t (Uji Validitas pengaruh)

Uji t statistik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara dua sisi (*two tail*).

2) R^2 (Koefisien Determinasi Majemuk)

Koefisien Determinasi merupakan proporsi atau prosedur hubungan varian dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

3) Uji F (F test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan eksis atau tidak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, penulisan hasil penelitian di dalam skripsi ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang:

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penyusunan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam menganalisis PAD, hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, model dan metode analisis data, uji statistik dan uji asumsi klasik.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis penelitian dan pembahasannya, pembuktian hipotesis serta inteprestasi ekonomi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi pada bab IV dan saran-saran yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA